

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor utama dalam menentukan perkembangan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pematangan individu serta pengoptimalan potensi masyarakat dapat terwujud. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibandingkan mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Indonesia yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional merupakan langkah strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang tersusun secara sistematis dan bertingkat, meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi (Syaadah dkk., 2022). Selanjutnya, pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang menjadi fondasi bagi pendidikan menengah. Pendidikan dasar terdiri dari Sekolah Dasar (sederajat), serta Sekolah Menengah Pertama (sederajat). Sementara itu, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan menengah adalah kelanjutan dari pendidikan dasar. Pendidikan menengah mencakup pendidikan menengah umum dan

pendidikan menengah kejuruan, yang terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau institusi lain yang setara (Rembangsupu dkk., 2022).

Pada era digital saat ini, pendidikan menjadi kebutuhan mendasar. Pemerataan pendidikan sedang diupayakan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kualitas pendidikan yang sama dapat dinikmati mulai dari ibu kota hingga daerah perbatasan. Namun, tantangan geografis yang beragam di Indonesia menyebabkan pemerataan pendidikan masih memerlukan upaya yang berkesinambungan (Maharani, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah telah merancang mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang berlaku bagi seluruh warga negara. Upaya ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola oleh satuan pendidikan, serta Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan menjadi langkah awal dalam meningkatkan mutu pendidikan (Permendikbud, 2016).

Salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah adalah pengimplementasian program wajib belajar. Kebijakan pendidikan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 mengenai program wajib

belajar sembilan tahun, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2015, pemerintah pusat melanjutkan kebijakan tersebut dengan menginisiasi program wajib belajar dua belas tahun, yang dikenal sebagai program pendidikan menengah universal. Program ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan serta keberhasilan kebijakan sebelumnya, sekaligus mempersiapkan generasi emas Indonesia pada tahun 2045 (Margiyanti & Maulia, 2023). Meskipun demikian, masih ditemukan kasus anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan, sehingga menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya tercapai dan efektivitas program tersebut masih perlu ditingkatkan.

Program wajib belajar selama 12 tahun ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap generasi bangsa setidaknya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sehingga harapannya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal hingga jenjang menengah. Kebijakan ini memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang bertujuan untuk dapat menghasilkan generasi yang bermutu dan berkualitas (Margiyanti & Maulia, 2023).

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Purworejo baru mulai menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kabupaten Purworejo Layak Anak. Peraturan ini, khususnya pada Pasal 19, menyatakan bahwa Pemerintah

Daerah menyelenggarakan Kabupaten Purworejo Layak Anak dalam klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya melalui pemenuhan indikator wajib belajar 12 tahun pada pendidikan formal dan non-formal. Sebelum kebijakan wajib belajar 12 tahun diterapkan, Pemerintah Kabupaten Purworejo masih mengacu pada regulasi sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam Pasal 12 peraturan tersebut dinyatakan bahwa "Setiap warga negara berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar." Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Kabupaten Purworejo masih terbatas pada pendidikan dasar selama sembilan tahun, yang mencakup jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.

Kebijakan pendidikan yang lama ini belum mencakup pendidikan menengah atas, sehingga belum sesuai dengan tujuan nasional yang mengharuskan wajib belajar 12 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Purworejo perlu melakukan penyesuaian kebijakan pendidikan agar sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun yang diamanatkan oleh pemerintah pusat. Dengan implementasi kebijakan baru ini, diharapkan seluruh anak di Kabupaten Purworejo dapat mengakses pendidikan hingga tingkat menengah atas, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal, sehingga mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan berkelanjutan di daerah tersebut.

Tabel 1. Data Peserta Didik Aktif Provinsi Jawa Tengah (per Kabupaten/Kota)
Semester 2024/2025 Genap

No	Wilayah	SD	SMP	SMA
1	Kab. Brebes	147.964	59.210	20.850
2	Kab. Cilacap	142.968	66.001	19.856
3	Kota Semarang	125.639	63.679	31.261
4	Kab. Banyumas	124.05	67.252	21.512
5	Kab. Tegal	128.056	47.814	11.975
6	Kab. Pemalang	128.14	51.204	13.194
7	Kab. Grobogan	110.221	42.068	18.525
8	Kab. Kebumen	100.258	43.248	13.807
9	Kab. Klaten	82.482	46.437	17.295
10	Kab. Jepara	79.252	31.091	14.682
11	Kab. Kendal	77.312	37.241	14.901
12	Kab. Demak	91.869	29.220	16.614
13	Kab. Pati	79.859	33.903	15.309
14	Kab. Magelang	75.544	38.489	15.956
15	Kab. Semarang	68.858	36.170	14.372
16	Kab. Sragen	65.958	34.745	11.947
17	Kab. Pekalongan	68.710	31.724	9.455
18	Kab. Boyolali	60.672	33.766	16.216
19	Kab. Banjarnegara	70.094	31.821	8.470
20	Kab. Wonogiri	62.419	34.383	11.648
21	Kab. Purbalingga	65.380	33.756	12.213
22	Kab. Karanganyar	59.875	32.593	11.716
23	Kab. Blora	59.883	27.682	9.715
24	Kab. Wonosobo	63.618	30.512	10.437
25	Kota Surakarta	53.241	30.696	20.157
26	Kab. Sukoharjo	51.989	31.683	15.584
27	Kab. Batang	60.050	24.739	6.661
28	Kab. Purworejo	56.599	26.755	9.510
29	Kab. Kudus	49.541	23.120	10.726
30	Kab. Temanggung	48.726	27.864	7.624
31	Kab. Rembang	47.770	18.472	8.961
32	Kota Tegal	22.734	13.661	6.253
33	Kota Pekalongan	19.296	11.773	3.948
34	Kota Salatiga	14.999	10.770	4.868
35	Kota Magelang	12.295	10.015	5.796

Sumber: Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah

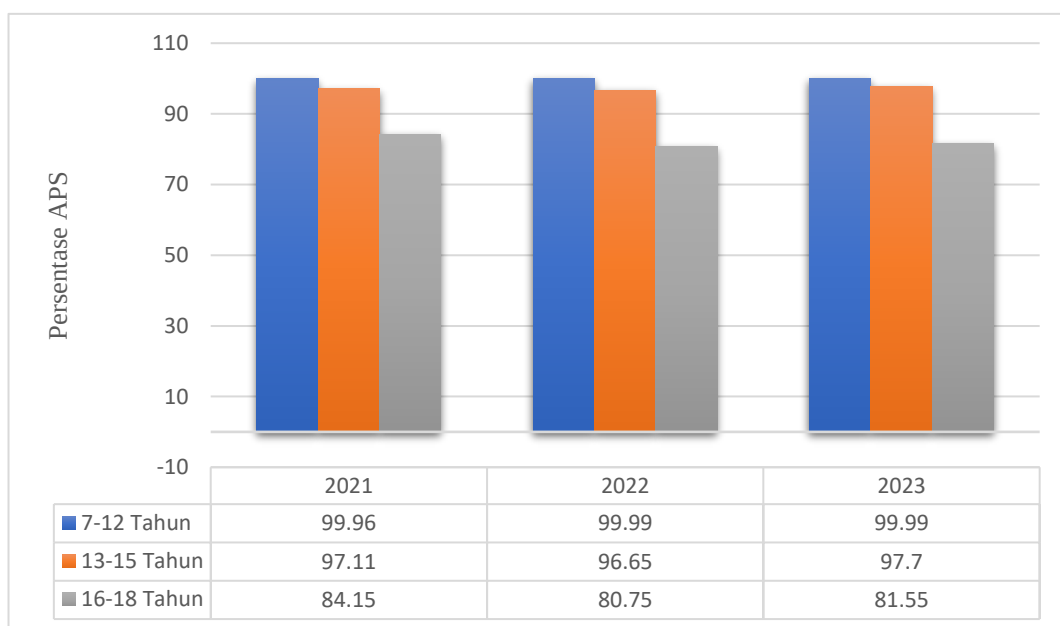
Berdasarkan data jumlah peserta didik di tingkat SD, SMP, dan SMA di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, terlihat adanya ketimpangan yang cukup signifikan antar wilayah, terjadi penurunan jumlah peserta didik secara bertahap dari tingkat SD ke SMP, dan lebih tajam lagi pada transisi ke SMA, dengan kata lain semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah jumlah partisipasi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Tercatat sebanyak 56.599 siswa SD dan 26.755 siswa SMP, namun hanya 9.510 siswa SMA. Rasio siswa SMA terhadap siswa SD di Purworejo adalah sekitar 16,8%, yang berada di bawah rata-rata provinsi. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan daerah tetangga seperti Kabupaten Magelang (21,1%) yang memiliki karakteristik demografis dan geografis serupa. Kabupaten Purworejo dengan jumlah peserta didik di tingkat SD mencapai 56.599 orang, menurun menjadi 26.755 di tingkat SMP, dan kembali menurun menjadi 9.510 di tingkat SMA. Artinya, terdapat penurunan lebih dari 50% dari SD ke SMP, dan sekitar 64% dari SMP ke SMA. Hal ini mencerminkan adanya tren penurunan yang konsisten antar jenjang pendidikan, yang menunjukkan bahwa terdapat hambatan sistemik maupun struktural yang berdampak terhadap keberlanjutan pendidikan masyarakat.

Pendidikan berperan sebagai salah satu instrumen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Standar pendidikan yang memadai diperlukan oleh masyarakat guna mendukung peningkatan kualitas hidup mereka. Indikator keberhasilan pendidikan di suatu wilayah diukur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Reba dkk, 2021). Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah

salah satu indikator pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator yang menunjukkan perbandingan antara jumlah peserta didik dalam kelompok usia sekolah tertentu yang sedang menempuh pendidikan pada berbagai jenjang dengan total populasi dalam kelompok usia sekolah tersebut, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi nilai APS, maka semakin banyak individu dalam kelompok usia sekolah yang sedang menempuh pendidikan di suatu wilayah (DPMPTSP, 2019).

Gambar 1. Grafik Persentase Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Purworejo untuk anak usia 7-12 tahun atau setara dengan Sekolah Dasar menunjukkan konsistensi dan partisipasi yang sangat baik. Pada tahun 2022 dan 2023, APS untuk kelompok usia ini mencapai

99,99 persen, menunjukkan hampir seluruh anak usia sekolah dasar di Purworejo mengikuti pendidikan formal. Namun, APS untuk anak usia 13-15 tahun atau setara dengan tingkat SMP mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2021, APS untuk kelompok ini tercatat sebesar 97,11 persen, menurun menjadi 96,65 persen pada tahun 2022, dan kembali naik menjadi 97,70 persen pada tahun 2023.

Berbeda dengan kelompok usia 16-18 tahun atau setara dengan tingkat SMA, terdapat penurunan signifikan dalam APS. Pada tahun 2021, APS untuk kelompok ini adalah 84,15 persen, kemudian menurun menjadi 80,75 persen pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 81,55 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mencapai sekitar 20 persen dari angka tertinggi, mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam mempertahankan partisipasi pendidikan di tingkat SMA. Fenomena ini menunjukkan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih intensif untuk memastikan anak-anak di Kabupaten Purworejo dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas.

Salah satu daerah yang memiliki partisipasi rendah dalam pendidikan formal adalah Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bruno, yang terletak di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, memiliki luas wilayah sebesar 108,43 km² dan terdiri atas 18 desa. Wilayah ini didominasi oleh dataran tinggi, dengan sekitar 75% dari keseluruhan wilayahnya berupa kawasan pegunungan dan perbukitan. Berdasarkan data kependudukan Kabupaten Purworejo tahun 2021, jumlah penduduk Kecamatan Bruno adalah 55.383 jiwa, dengan 28.477 laki-laki dan 26.906 perempuan.

Tabel 2. Penduduk Menurut Tingkatan Akhir Pendidikan di Kabupaten
Purworejo Tahun 2021-2023

Tingkat Pendidikan	Pria			Wanita			Jumlah		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
SD/Sederajat	103.160	100.946	98.874	120.520	118.410	116.156	223.680	219.356	215.030
SLTP/Sederajat	74.547	74.519	74.253	74.303	74.260	73.902	148.850	148.779	148.155
SLTA/Sederajat	101.922	104.141	105.716	83.705	85.451	86.921	185.627	189.592	192.637

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo 2021 (Diolah kembali oleh peneliti)

Berdasarkan data pada tabel diatas, kualitas penduduk Kabupaten Purworejo terdapat kecenderungan peningkatan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SLTA/ sederajat), meskipun pertumbuhan tersebut bersifat relatif terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD/ sederajat) maupun Sekolah Menengah Pertama (SLTP/ sederajat).

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Purworejo yang berpendidikan terakhir SLTA/ sederajat tercatat sebanyak 192.637 jiwa, terdiri dari 105.716 pria dan 86.921 wanita. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 185.627 jiwa. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berpendidikan terakhir SD/ sederajat pada tahun yang sama, yaitu sebanyak 215.030 jiwa, terlihat bahwa sebagian besar penduduk masih berhenti pada jenjang pendidikan dasar. Sementara itu, jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SLTP/ sederajat relatif stagnan.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Tamatan Sekolah Dasar di Kabupaten Purworejo
Tahun 2021 (per Kecamatan)

No.	Kecamatan	SD/Sederajat		SLTP/Sederajat		SLTA/Sederajat	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Grabag	14.078	27,5	8.914	17,42	12.756	24,92
2.	Ngombol	8.220	22,74	6.971	19,29	9.978	27,61
3.	Purwodadi	9.037	21,34	7.797	18,41	12.456	29,42
4.	Bagelen	8.156	25,88	6.600	20,95	8.209	26,05
5.	Kaligesing	10.689	32,61	7.574	23,1	5.949	18,15
6.	Purworejo	15.476	17,57	14.459	16,42	27.690	31,44
7.	Banyuurip	7.241	16,59	8.212	18,82	14.260	32,68
8.	Bayan	12.206	23,03	10.195	19,24	14.048	26,5
9.	Kutoarjo	15.257	24,23	11.028	17,51	18.042	28,65
10.	Butuh	10.766	24,64	7.978	18,26	12.073	27,63
11.	Pituruh	17.163	31,48	11.088	20,34	10.758	19,73
12.	Kemiri	20.804	34,22	11.539	18,98	11.696	19,24
13.	Bruno	24.475	44,19	8.279	14,95	3.962	7,15
14.	Gebang	13.536	30,27	9.094	20,34	8.819	9,72
15.	Loano	11.982	30,33	8.666	21,93	7.462	18,89
16.	Bener	24.597	41,6	10.456	17,68	7.469	12,63
Jumlah		223.683	27,98	148.850	18,62	185.627	23,22

Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Bruno memiliki persentase tertinggi penduduk yang hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2021. Persentase ini mencapai 44,19%, yang setara dengan 24.475 penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Bruno berdasarkan profil kependudukan Kabupaten Purworejo tahun 2021 adalah sebanyak 55.383 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari populasi di Kecamatan Bruno hanya memiliki pendidikan dasar.

Kemudian, pada tingkat pendidikan SLTP/Sederajat, Kecamatan Bruno menunjukkan persentase sebesar 14,95% (8.279 penduduk), sementara pada tingkat SLTA/Sederajat, persentasenya adalah 7,15% (3.962 penduduk) pada tahun yang sama. Data tersebut mengindikasikan adanya penurunan persentase penduduk yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang disebabkan oleh banyaknya anak-anak yang hanya menamatkan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar atau tidak melanjutkan sekolah. Hal ini dapat dikonfirmasi melalui tabel di bawah yang menunjukkan jumlah penduduk yang tidak bersekolah, di mana Kecamatan Bruno memiliki persentase tertinggi dan menunjukkan kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Purworejo.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Usia 7-16 Tahun Yang Tidak Bersekolah di Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Kabupaten/Kota : 33.6 PURWOREJO								
No	Kecamatan		Pria		Wanita		Jumlah	
	Kode	Nama	n	%	n	%	n	%
1	33.6.01	GRABAG	1,710	5.84	1,566	5.73	3,276	5.79
2	33.6.02	NGOMBOL	1,412	4.82	1,297	4.74	2,709	4.79
3	33.6.03	PURWODADI	1,780	6.08	1,681	6.15	3,461	6.11
4	33.6.04	BAGELEN	715	2.44	696	2.55	1,411	2.49
5	33.6.05	KALIGESING	1,214	4.15	1,118	4.09	2,332	4.12
6	33.6.06	PURWOREJO	2,909	9.94	2,735	10	5,644	9.97
7	33.6.07	BANYUURIP	1,477	5.05	1,354	4.95	2,831	5
8	33.6.08	BAYAN	2,251	7.69	2,133	7.8	4,384	7.74
9	33.6.09	KUTOARJO	1,751	5.98	1,639	5.99	3,390	5.99
10	33.6.10	BUTUH	1,514	5.17	1,500	5.49	3,014	5.32
11	33.6.11	PITURUH	2,042	6.98	1,911	6.99	3,953	6.98
12	33.6.12	KEMIRI	1,929	6.59	1,704	6.23	3,633	6.42
13	33.6.13	BRUNO	2,998	10.24	2,732	9.99	5,730	10.12
14	33.6.14	GEBANG	1,856	6.34	1,788	6.54	3,644	6.44
15	33.6.15	LOANO	1,542	5.27	1,453	5.31	2,995	5.29
16	33.6.16	BENER	2,166	7.4	2,039	7.46	4,205	7.43
Jumlah			29.266	100%	27.346	100%	56.612	100%

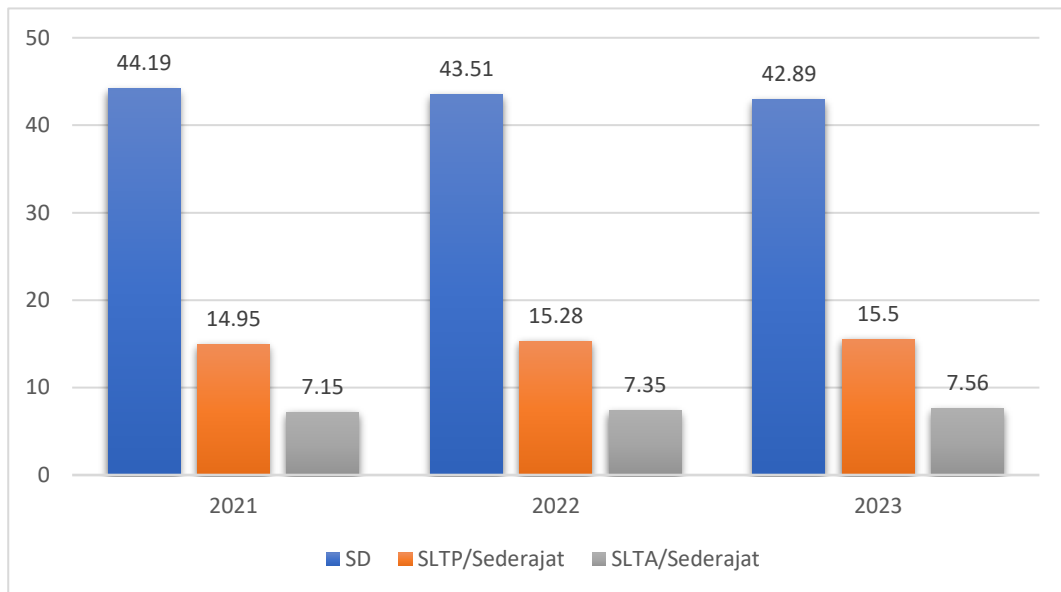
Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo Tahun 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 56.612 anak usia 7-16 tahun di Kabupaten Purworejo yang tidak bersekolah. Meskipun jumlah ini tidak signifikan jika dibandingkan dengan total populasi Kabupaten Purworejo, tetap perlu mendapat perhatian dan menjadi prioritas bagi pemerintah Kabupaten Purworejo. Selain itu, tabel tersebut juga mengungkapkan distribusi anak usia 7-16 tahun yang tidak bersekolah berdasarkan jenis kelamin, dengan persentase anak laki-laki yang tidak bersekolah lebih tinggi dibandingkan anak perempuan.

Berdasarkan data dalam tabel, Kecamatan Bruno mencatat jumlah tertinggi penduduk berusia 7-16 tahun yang tidak atau belum bersekolah, yaitu sebanyak 5.730 jiwa, disusul oleh Kecamatan Purworejo dengan 5.640 jiwa. Sebaliknya, jumlah penduduk dalam rentang usia yang sama yang tidak atau belum bersekolah paling sedikit terdapat di Kecamatan Bagelen, yaitu sebanyak 1.411 jiwa.

Tingginya angka anak usia 7-16 tahun yang tidak atau belum bersekolah menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap warga negara dalam rentang usia tersebut diwajibkan untuk menempuh pendidikan dasar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Purworejo perlu meningkatkan perhatian terhadap anak-anak usia sekolah yang belum mengakses pendidikan. Selain itu, sesuai dengan Pasal 11 dalam undang-undang yang sama, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan dan fasilitas yang memadai serta memastikan terselenggaranya pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Pemerintah juga berkewajiban menjamin ketersediaan anggaran guna mendukung terselenggaranya pendidikan bagi seluruh anak yang berusia tujuh hingga enam belas tahun.

Gambar 2. Grafik Persentase Penduduk Dalam Menempuh Pendidikan SD-SMA Tahun 2021-2023



Sumber: Profil Kependudukan Kabupaten Purworejo

Berdasarkan data yang terdapat pada bagan di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kecamatan Bruno yang menempuh pendidikan formal pada tingkat dasar dan menengah dari tahun 2021 hingga 2023 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, proporsi penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) mencapai 44,19%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 14,95%, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) hanya 7,15%. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang tamat SD sedikit menurun menjadi 43,51%, sedangkan yang tamat SMP meningkat menjadi 15,28%, dan yang tamat SMA meningkat sedikit menjadi 7,35%. Pada tahun 2023, data menunjukkan penurunan lebih lanjut dalam jumlah penduduk yang tamat SD menjadi 42,89%, sementara jumlah yang tamat SMP meningkat menjadi 15,50%, dan yang tamat SMA menjadi 7,56%.

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal pada jenjang SMA dan apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya anak dalam melanjutkan pendidikan ke SMA, karena partisipasi pada jenjang ini yang sangat rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan lainnya. Partisipasi di tingkat SMA yang hanya sebesar 7,15 persen menunjukkan adanya masalah yang perlu untuk diidentifikasi, mengingat pendidikan di tingkat menengah atas adalah kunci untuk pengembangan keterampilan dan kompetensi yang lebih tinggi.

Kecamatan Bruno dipilih sebagai lokasi penelitian dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo karena pada data awal menunjukkan adanya ketimpangan yang signifikan dalam partisipasi pendidikan pada tingkat SMA yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo. Kemudian, penelusuran literatur menunjukkan bahwa kecamatan ini belum banyak diteliti dalam konteks pendidikan formal, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru yang signifikan bagi pemahaman dan upaya peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kecamatan Bruno.

Pemilihan Kabupaten Purworejo sebagai lokasi penelitian dalam studi ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang mendalam. Pertama, aksesibilitas data di Kabupaten Purworejo dinilai lebih mudah dan dapat diandalkan dibandingkan dengan kabupaten atau wilayah lain. Kedua, terdapat relevansi yang signifikan antara permasalahan pendidikan di Kabupaten Purworejo dengan kebijakan lokal yang diterapkan di wilayah tersebut. Kabupaten Purworejo baru mulai menerapkan program wajib belajar 12 tahun pada tahun 2023, meskipun

secara nasional program ini telah diimplementasikan sejak Juni 2015 (Kemdikbud, 2015). Kondisi ini memberikan kesempatan untuk menganalisis dampak dan partisipasi masyarakat dalam mengejar pendidikan formal tingkat SMA di wilayah yang baru mengadopsi kebijakan penting ini, sehingga dapat memberikan wawasan berharga bagi pengembangan kebijakan pendidikan di masa mendatang.

Studi sebelumnya telah mengungkap berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Nia Agustina dan Santri Salam (2019) dalam penelitiannya tentang rendahnya tingkat pendidikan di Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang, menemukan bahwa rendahnya motivasi individu, ketidakstabilan ekonomi, kurangnya dukungan orang tua, serta budaya yang menganggap rendah pentingnya pendidikan formal, menjadi kendala utama. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Dekkers & Driessen (1997), yang dikutip oleh Dewa dan Prasetyo (2022), yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi sekolah penduduk, yang terbagi menjadi faktor pendorong (push factor) dan faktor penarik (pull factor). Faktor pendorong, yang berasal dari dalam diri siswa, memengaruhi keputusan siswa untuk melanjutkan atau menghentikan pendidikan. Sebaliknya, faktor penarik yang berasal dari luar individu, seperti dukungan keluarga, lingkungan, teman sebaya, dan organisasi masyarakat, turut memengaruhi keputusan siswa dalam pendidikan.

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Kecamatan Bruno,

Kabupaten Purworejo. Riswan Assa, Evelin, dan Juliana (2022), dalam penelitiannya mengenai penyebab putus sekolah di Desa Sunuo, mengungkapkan beberapa faktor, antara lain kurangnya minat anak untuk bersekolah, kondisi ekonomi orang tua, kurangnya dukungan keluarga, serta pengaruh lingkungan sosial dan masyarakat. Faktor ekonomi orang tua menjadi salah satu penyebab utama putus sekolah, karena keterbatasan dana untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, serta adanya perasaan kasihan terhadap anak yang akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, rendahnya motivasi anak untuk bersekolah juga berkontribusi terhadap putus sekolah, karena kurangnya dorongan dan semangat dalam belajar, yang menyebabkan anak merasa malas dan enggan melanjutkan pendidikan. Lingkungan sosial juga turut berperan, di mana pengaruh pergaulan dengan teman-teman yang tidak bersekolah atau yang telah tamat tetapi menganggur, dapat memengaruhi keputusan anak untuk berhenti sekolah. Analisis ini dapat membantu memahami apa yang menjadi faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal tingkat SMA di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan teori tersebut dan ketersediaan data yang ada, penelitian ini akan menyesuaikan analisis terhadap kondisi masyarakat yang dihadapi terkait faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pendidikan. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi pendidikan akan bergantung pada dinamika yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

Berdasarkan data diatas peneliti menyimpulkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kecamatan Bruno masih di bawah rata-rata kabupaten.

Rendahnya partisipasi ini berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Sehingga, peneliti ingin mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di tingkat SMA. Penelitian yang ingin peneliti teliti khususnya di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Adapun judul penelitian ini adalah “Partisipasi Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Formal Tingkat SMA di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan data permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, adapun rumusan masalah yang diambil adalah:

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal pada tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?
- 2) Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan formal pada tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi anak dalam melanjutkan pendidikan dasar di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal pada tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

- 2) Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan formal pada tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori partisipasi masyarakat dalam pendidikan dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk melanjutkan pendidikan formal. Dengan menganalisis konteks sosial, ekonomi, dan budaya di Kecamatan Bruno, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai dinamika partisipasi pendidikan di daerah pedesaan. Temuan dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk studi-studi selanjutnya, sehingga dapat memperkaya literatur yang ada mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh instansi terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purworejo, untuk merumuskan kebijakan yang mendukung program wajib belajar 12 tahun, terutama dalam menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan akses pendidikan di Kecamatan Bruno.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat Kecamatan Bruno mengenai pentingnya pendidikan

formal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan peran mereka dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak.

- c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Administrasi Publik, serta diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan terkait partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.
- d. Bagi umum, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat umum mengenai tantangan dan faktor-faktor yang berperan pada partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. *State of The Art*

Dalam penelitian ini, *state of the art* mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman penulis dalam merancang penelitian yang akan dilaksanakan. Informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai landasan dan perbandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Dalam literatur ini, akan mencakup berbagai jurnal yang relevan.

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
1.	Kristianus Ade Putra Kusuma. (2022). Rendahnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Formal Didesa Legong Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Desa Legong serta mendeskripsikan determinan yang mempengaruhi kondisi tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan teori <i>Community-based Development</i> .	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Desa Legong mengalami peningkatan, angka putus sekolah masih tergolong tinggi. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan aksesibilitas akibat jarak ke sekolah, rendahnya tingkat kepedulian, kendala ekonomi, serta faktor lingkungan.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian
2.	Fitri dan Ade Agusriani. (2024). Partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. <i>Jambura Early Childhood Education Journal</i>	Tujuan penelitian dalam jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Desa Parinding serta mengkaji hambatan yang dihadapi dalam upaya tersebut. Studi ini menggunakan metode fenomenologi guna mengeksplorasi dinamika partisipasi masyarakat dalam pendidikan anak usia dini di wilayah tersebut.	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan melalui keterlibatan orang tua peserta didik dalam mendukung program pembelajaran di lembaga pendidikan anak usia dini. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi serta pelibatan orang tua dalam program parenting juga menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi tersebut. Namun, terdapat berbagai faktor yang menghambat peningkatan partisipasi masyarakat, di antaranya adalah kurangnya kepedulian dan pemahaman	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
				orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi, keterbatasan ekonomi, serta kesibukan masyarakat.	
3.	Andi Chandrakirana, Almawardy, dan Widia Sari. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di MI Pesantren Modern Bone Macope. Jurnal Mappesona	Penelitian dalam jurnal ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di MI Pesantren Modern Bone Macope serta mengevaluasi dampak dari keterlibatan masyarakat terhadap mutu pendidikan. Kajian ini menggunakan pendekatan teori <i>Total Quality Management</i> (TQM).	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di MI Pesantren Modern Bone Macope memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Bentuk partisipasi ini mencakup kontribusi dalam aspek materi, tenaga, maupun pemikiran yang mendukung pencapaian keberhasilan sekolah. Selain itu, kualitas pendidikan di sekolah tersebut dinilai baik berdasarkan budaya sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta implementasi kurikulum dan proses pembelajaran yang kompleks serta kondusif.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian
4.	Budi Wiratno. (2016) Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola komunikasi antara institusi pendidikan dan masyarakat serta mengeksplorasi upaya peningkatan kualitas sekolah melalui pelibatan masyarakat dalam penyusunan kurikulum lokal serta pemilihan fasilitator pembelajaran dari komunitas setempat. Studi ini menggunakan teori <i>first order understanding</i> dan <i>second order understanding</i> (Subadi, 2013: 105).	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan di sekolah dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menawarkan sanksi, hadiah, persuasi, dan himbauan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya semangat kerjasama antara sekolah dan masyarakat dalam mewujudkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
5.	Latifa Qurrotaini dan Azmi Al Bahij. (2018). Partisipasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Terhadap Program Adiwiyata. Jurnal Ilmiah PGSD	Penelitian ini berfokus pada analisis perbedaan tingkat keterlibatan tenaga kependidikan dalam program penghargaan Adiwiyata di Sekolah Dasar Dharma Karya UT dan Sekolah Dasar Negeri Tanah Tinggi 3, yang berlokasi di Kota Tangerang, Banten.	Deskriptif Kualitatif	Penelitian ini mengungkapkan adanya perbedaan tingkat partisipasi antara pendidik dan tenaga kependidikan dalam program Adiwiyata di SD Dharma Karya UT dan SDN Tanah Tinggi 3. Perbedaan tersebut tidak menunjukkan rendahnya tingkat keterlibatan dalam program, melainkan menggambarkan bahwa secara keseluruhan, para responden di kedua sekolah tersebut aktif dalam berbagai kegiatan berbasis partisipasi. Tingginya partisipasi tersebut tercermin dari keterlibatan pimpinan dan tenaga kependidikan dalam menjaga serta meningkatkan penghargaan Adiwiyata yang telah diraih oleh kedua sekolah tersebut.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian
6.	Maulina Nur Afifah, Dayat Hidayat, Safira Musa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Masyarakat di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek. Jurnal	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan: (1) elemen-elemen dalam masyarakat yang terlibat dalam partisipasi, (2) berbagai bentuk keterlibatan yang dilakukan, serta (3) faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan maupun kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan di PKBM Tim Suara Masyarakat Dawuan Cikampek.	Mix Methode	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program di PKBM Tim Suara Masyarakat Dawuan menunjukkan kecenderungan positif. Kelompok masyarakat yang berperan dalam partisipasi ini mencakup pemuka masyarakat, seperti ketua RT dan RW, komunitas LPI, peserta didik, tenaga pengajar atau instruktur pelatihan, donatur tidak tetap, serta sektor Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang diwakili oleh PT Pupuk Kujang dan PLN, serta pihak pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat. Faktor-faktor yang mendorong	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
	Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah			partisipasi masyarakat antara lain manfaat langsung yang diperoleh, sedangkan hambatan utama berasal dari keterbatasan waktu masyarakat akibat tuntutan pekerjaan utama mereka.	
7.	Charless Kapile Dan Rusmiati Aras. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Pelaksanaan Pendidikan Dasar di Desangovi Kecamatan Rio Pakava Kabupaten Donggala. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat, khususnya orang tua, dalam pendidikan di Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat, khususnya orang tua, dalam pendidikan di Desa Ngovi, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari kecenderungan masyarakat yang hanya menyekolahkan anak-anak mereka hingga jenjang sekolah dasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan meliputi keterbatasan akses akibat jarak, kendala ekonomi, serta rendahnya motivasi dari orang tua.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian
8.	Sri Minarti. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Mutu Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Keislaman	Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran serta masyarakat, khususnya komite sekolah dan wali murid, dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di SMPN 1 dan SMPN 2 Bojonegoro. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian teoritis mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta mutu pendidikan yang mencakup aspek input, proses, dan output. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi orang tua atau wali murid memiliki peran signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan di SMPN 1 dan SMPN 2 Bojonegoro. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengelolaan lembaga pendidikan, serta proses monitoring dan evaluasi. Kualitas output pendidikan diukur berdasarkan prestasi akademik maupun nonakademik yang dicapai oleh para lulusan.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
		fenomenologi (Littlejohn) serta teori mutu (Deming).			
9.	Syafrizal Fuady. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur. Jurna; Kajian Ilmu Pendidikan (Tarbiyatul Misbah)	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keterlibatan masyarakat di Desa Marga Cinta, Kecamatan Belitang Madang Raya, Kabupaten OKU Timur, dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam, baik dalam lingkungan keluarga maupun komunitas. Kajian ini menelusuri berbagai bentuk kontribusi masyarakat terhadap pengembangan pendidikan Islam, yang mencakup aspek finansial, material, akademik, kultural, serta evaluatif.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pendidikan di Desa Marga Cinta terwujud dalam lima bentuk utama, yaitu dukungan finansial, kontribusi material, keterlibatan akademik, partisipasi kultural, dan evaluasi. Masyarakat berperan dalam pendanaan, penyediaan bahan bangunan, pembinaan akademik anak-anak, pelestarian budaya dan perayaan keagamaan, serta pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian
10.	Nia Qurrotul 'Ain. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengatasi Putus Sekolah di Kabupaten Tangerang. Jurnal Ilmu Pemerintahan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi sosial dalam menangani permasalahan putus sekolah di Kabupaten Tangerang. Kajian ini menggunakan pendekatan teori partisipasi sosial sebagai dasar analisis.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tangerang telah berupaya mengatasi permasalahan putus sekolah melalui Program Pendidikan Kesetaraan Tingkat Desa (PAKADES). Namun, dalam tahap perencanaan dan penyusunan program ini, keterlibatan masyarakat tidak diakomodasi secara optimal. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program, pemerintah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat desa, RT, RW, serta masyarakat.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

No	Nama Penulis, Tahun, Judul, Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Temuan Penelitian	Perbedaan
11.	Markus Wantik, Joorie. M. Ruru, dan Rully Mambo. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua. Jurnal Administrasi Publik	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kecamatan Silokarno Doga, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Studi ini menggunakan konsep dimensi-dimensi partisipasi masyarakat dalam pendidikan sebagai dasar teoritisnya.	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap sekolah dasar dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan masih terbatas. Partisipasi masyarakat lebih banyak berasal dari kelompok tertentu, seperti para tokoh masyarakat, sementara mayoritas masyarakat belum terlibat secara aktif dalam pengembangan pendidikan di sekolah.	Terdapat perbedaan dalam lokus dan fokus penelitian

Berdasarkan tabel diatas, dalam penelitian ini, penulis merujuk pada berbagai studi terdahulu yang relevan untuk memberikan konteks dan landasan teoritis yang kuat dan memiliki kesamaan dan perbedaan yang signifikan mengenai partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Pada penelitian ini mengadopsi penelitian yang dilakukan oleh Syafrizal Fuady (2022) berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pendidikan Islam di Desa Marga Cinta Kecamatan Belitang Madang Raya Kabupaten Oku Timur" dimana perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada lokus penelitian yang mana Fuady berfokus pada pendidikan Islam di Desa Marga Cinta, sedangkan penelitian ini meneliti pendidikan formal di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Bruno. Selanjutnya perbedaan pada fokus penelitian dimana Fuady lebih terarah pada pengembangan pendidikan Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendidikan formal yang lebih umum. Namun, kedua studi ini memiliki kesamaan dengan menggunakan pendekatan teoritis yang serupa, yaitu mengacu pada teori partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh Syafrizal Fuady juga diadopsi untuk menganalisis bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yang mencakup aspek finansial, material, akademik, kultural, dan evaluatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lokus dan fokus penelitian berbeda, kerangka teoritis yang digunakan tetap relevan dan dapat diterapkan untuk memahami dinamika partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

1.5.2. Administrasi Publik

1.5.2.1. Definisi Administrasi Publik

Pengertian administrasi publik ini mengacu pada berbagai konsep dan definisi yang diajukan oleh para ahli dalam bidang administrasi publik. Menurut Rosenbloom dan Goldavan (1989) dalam buku yang ditulis (Abdul Kadir, 2020:43), administrasi publik merujuk pada praktik kepemimpinan dalam konteks politik serta berbagai proses dan teori yang sah dalam menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial dalam penyusunan regulasi untuk pelayanan masyarakat. Konsep ini menyoroti peran sentral administrasi publik dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan dan memberikan kerangka kerja yang krusial dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, Levine, Peters, dan Thomson (1990) dalam buku yang ditulis (Abdul Kadir, 2020:43) mengemukakan bahwa fokus administrasi publik terletak pada berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk perilaku dari para pejabat resmi yang bertanggung jawab atas tindakan mereka, meskipun biasanya mereka tidak terpilih. Hal ini menekankan aspek tanggung jawab dan akuntabilitas dalam administrasi publik, di mana pejabat yang ditunjuk harus mematuhi prinsip-prinsip etika dan kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas mereka.

Dalam perspektif Herbert A. Simon, Donal W. Smithurg dan Victor A. Thomson (1970) dalam buku yang ditulis (Abdul Kadir, 2020:45), Administrasi publik melibatkan aktivitas eksekutif dalam pemerintahan di tingkat nasional, daerah, dan negara bagian, termasuk entitas badan dan komisi yang dibentuk oleh legislatif dan perundang-undangan negara bagian, serta perusahaan negara dan

unit-unit pemerintah lainnya. Dalam hal ini, lembaga yudisial dan legislatif tidak termasuk dalam administrasi pemerintahan. Pemahaman ini membedakan peran administrasi publik dari cabang-cabang lain dalam pemerintahan, menekankan pentingnya pengelolaan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan konsep-konsep yang diusulkan oleh para ahli dalam bidang administrasi publik memberikan pandangan yang holistik tentang tata kelola pemerintahan. Dalam rangka mencakup aspek kepemimpinan politis, pelaksanaan kebijakan, serta tanggung jawab eksekutif, konsep-konsep tersebut menjadi dasar penting dalam membentuk kerangka kerja administrasi publik yang komprehensif. Keterkaitan administrasi publik dengan pelayanan publik menjadi semakin nyata, di mana kualitas pelaksanaan administrasi publik sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat akan berpartisipasi. Terlebih lagi, konsep-konsep administrasi publik ini juga memberikan pijakan untuk mengenali dan merespons tuntutan masyarakat yang semakin dinamis.

1.5.2.2. Fungsi Administrasi Publik

Dalam buku yang dikarang oleh Abdul Kadir (2020), dia memperkenalkan konsep sistem pemerintahan dwipraja, yang juga sering disebut sebagai dikotomi politik dan administrasi. Konsep ini mengilustrasikan pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi dua bidang utama, yaitu kekuasaan politik dan kekuasaan administrasi. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam proses administrasi publik, dan pemahaman tentang perbedaan ini merupakan elemen kunci dalam memahami bagaimana pemerintah bekerja.

Pertama, dalam konsep dwipraja, terdapat tingkat politik yang bertugas dalam merumuskan kebijakan umum atau kebijakan publik. Tingkat politik ini terdiri dari pemimpin tertinggi negara, yaitu Presiden, serta pembantu-pembantunya, seperti Wakil Presiden dan para menteri. Mereka adalah aktor-aktor utama dalam proses perumusan kebijakan dan memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan pemerintah.

Kedua, tingkat administrasi dalam sistem dwipraja adalah tingkat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan oleh tingkat politik. Tugas utama tingkat administrasi adalah menjalankan program-program pemerintah, mengelola sumber daya publik, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mereka bertindak sebagai pelaksana kebijakan yang mengubah konsep-konsep kebijakan menjadi tindakan konkret.

Pentingnya konsep ini dalam konteks administrasi publik di Indonesia adalah bahwa terdapat interaksi yang erat antara organ tingkat politik dan organ tingkat administrasi. Interaksi ini melibatkan beberapa tahap, termasuk perencanaan, perumusan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kebijakan publik. Keduanya harus bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemahaman yang baik tentang sistem dwipraja dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mengurangi potensi konflik, dan memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan benar-benar dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, konsep ini memiliki relevansi yang besar dalam konteks administrasi publik di Indonesia. Dengan memahami perbedaan antara kekuasaan

politik dan administrasi, serta interaksi antara keduanya, kita dapat mengembangkan kerangka kerja yang lebih efektif untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik.

1.5.2.3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Lingkup yang sangat kompleks dalam administrasi publik bergantung pada perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat, dan salah satu cara untuk mengukurnya adalah dengan menentukan jenis lembaga yang ada, baik departemen maupun non-departemen. Seperti yang dikemukakan oleh Chandler dan Plano (1988:33) dalam buku yang ditulis oleh Intan Fitri Meutia (2017) bahwa semakin kompleks permasalahan dalam suatu negara, semakin kompleks pula tugas yang diemban oleh pemerintah.

Nikolas Henry (1995) (dalam Meutia, 2017) menulis buku yang menjelaskan beberapa aspek dari topik yang dia bahas serta perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

- 1) Organisasi publik, yang pada dasarnya berkaitan dengan perilaku birokratis dan struktur organisasi.
- 2) Manajemen publik meliputi elemen seperti sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, pembagian anggaran publik, dan pengelolaan sumber daya manusia.
- 3) Pelaksanaan kebijakan publik, ini mencakup metode untuk membuat dan menerapkan kebijakan, privatisasi, administrasi antar pemerintahan, dan etika birokrasi.

James L. Perry dalam bukunya "*Handbook of Public Administration*" (1989) dikutip dari buku Intan Fitri Meutia (2017) menguraikan beberapa topik sentral dalam administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam administrasi negara dan upaya penyesuaian.
- 2) Struktur organisasi dan manajemen yang efektif.
- 3) Administrasi negara memperkuat hubungannya dengan badan legislatif, yang dipilih dan dipilih oleh rakyat.
- 4) Proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang sukses.
- 5) Administrasi perpajakan yang efektif dan pengelolaan anggaran.
- 6) Manajemen sumber daya manusia.
- 7) Pelayanan publik yang efisien dan berkualitas.
- 8) Praktik administrasi publik yang sesuai dengan profesionalisme dan etika.

1.5.2.4. Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik telah mengalami perkembangan yang semakin kompleks sebagai suatu disiplin ilmu. Nicholas Henry (1975) mengemukakan bahwa terdapat enam paradigma dalam evolusi administrasi publik, yaitu: pertama, dikotomi antara politik dan administrasi (1900–1926); kedua, prinsip-prinsip administrasi publik (1927–1937); ketiga, administrasi publik sebagai bagian dari ilmu politik (1950–1970); keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956–1970); kelima, administrasi publik sebagai entitas tersendiri (1970–1990); dan keenam, administrasi publik dalam konteks governance (1990–sekarang).

1.5.3. Manajemen Publik

1.5.3.1. Definisi Manajemen Publik

Dalam konteks lingkungan organisasi, manajemen merupakan unsur krusial yang diperlukan untuk mengoordinasikan dan mengatur proses operasional organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Khususnya dalam instansi pemerintah, diperlukan manajemen yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan layanan publik, dengan tujuan akhir memenuhi kepuasan masyarakat. Konsep manajemen publik mencakup domain yang lebih luas, yaitu masyarakat umum. Dalam lingkup manajemen publik, fokus utamanya adalah pada studi tentang cara mengelola dan mengatur sumber daya yang tersedia dengan efisien dan efektif untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa publik masyarakat. Definisi manajemen publik dapat bervariasi sesuai dengan pengalaman, pendidikan, atau perspektif para ahli.

Menurut Shafritz dan Russel sebagaimana diuraikan oleh Firdausijah dkk (2023:7), konsep Manajemen Publik merujuk pada upaya individu atau kelompok dalam mengemban tanggung jawab dalam menjalankan suatu organisasi. Hal ini melibatkan sumber daya manusia dalam pemanfaatan optimalisasi dan teknologi dalam mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

Definisi lain dari Manajemen Publik, berdasarkan pendapat Ott, Hyde, dan Shafritz (1990) sebagaimana dijabarkan (dalam Firdausijah dkk., 2023:7), menggambarkan Manajemen Publik sebagai usaha yang difokuskan pada proses implementasi kebijakan publik oleh organisasi publik yang telah disetujui

bersama. Tujuannya adalah menjalankan kebijakan tersebut dengan efisiensi dan efektivitas.

Perspektif Nor Ghofur (2014) sebagaimana dijelaskan (dalam Firdausijah dkk., 2023:7) terhadap Manajemen Publik lebih menekankan pada konteks pemerintahan. Dalam pandangan ini, Manajemen Publik memiliki tujuan untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pelayanan kepada masyarakat dengan fokus utama memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, Manajemen Publik merupakan upaya yang dilakukan dalam organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk mengelola sumber daya, menerapkan kebijakan publik, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan efisien dan efektif, dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berbagai definisi dan pandangan tersebut memberikan kerangka pemahaman yang kaya terkait dengan konsep Manajemen Publik dalam konteks penelitian ini.

1.5.3.2. Paradigma Manajemen Publik

1) Old Public Administration

Woodrow Wilson menciptakan gerakan perubahan tentang perbedaan antara politik dan administrasi, percaya bahwa administrasi publik harus terpisah dari dunia politik. Ini adalah dasar Paradigma Administrasi Publik Lama atau bisa disebut dengan OPA, Selain itu juga dikenal sebagai Administrasi Publik Klasik atau Administrasi Publik Lama (Ahmad, 2012) (dalam Endang Irawan, 2021:11).

2) *New Public Management*

Pada tahun 1990, muncul gagasan *The New Public Management* yang menandai kemajuan dalam manajemen publik. Konsep ini memberikan indikasi yang jelas tentang urgensi perubahan dalam pengelolaan manajemen publik. Pasolong (2007: 97) Dalam karya Iwan Satibi (2023), beberapa aspek penting ditekankan, termasuk peralihan dari paradigma administrasi tradisional ke penekanan pada kinerja dan hasil, menghindari keterikatan pada birokrasi klasik, menetapkan tujuan dan target organisasi dan personel secara lebih terperinci, komitmen politis yang lebih kuat dari staf senior terhadap pemerintah sehari-hari, dan fokus pada pasar dan kontrak kerja keluar, dan melibatkan pihak swasta dalam penyediaan layanan, tidak hanya terpaku pada birokrasi, serta pengurangan fungsi pemerintah melalui privatisasi juga harus dijalankan.

3) *Reinventing Government*

Paradigma yang dikenal sebagai "*Reinventing Government*" diperkenalkan oleh Osborne & Gabler sekitar tahun 1992 dan diterapkan oleh Osborne dan Plastrik pada tahun 1997-an. Inti dari paradigma ini adalah rekomendasi agar pemerintah mengadopsi karakteristik berikut: berperan sebagai katalis, berada dalam kepemilikan komunitas atau lembaga; bersaing, berfokus pada misi, berorientasi pada hasil, melayani pelanggan; bersikap wirausaha, bersifat antisipatif, terdesentralisasi, dan berorientasi pada pasar.

4) *New Public Service*

Paradigma *New Public Management* dan *Reinventing Government* dianggap tidak lagi relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. pada perkembangannya, sehingga muncul paradigma baru yang dikenal sebagai "*The New Public Service*" pada sekitar tahun 2003, yang mengusulkan peralihan prinsip administrasi klasik ke prinsip "*New Public Service*". Dalam hal ini, Denhardt & Denhardt (2003: 42-43) (dalam Iwan Satibi, 2023) menyebutkan prinsip *the new public service* yaitu fungsi pemerintah adalah melayani masyarakat bukan sebaliknya, mengejar kepentingan publik, nilai kewarganegaraan lebih utama dibanding kewirausahaan, berpikir secara strategis, mengakui bahwa akuntabilitas tidaklah sederhana dimana aparaturnya harus mematuhi peraturan dan konstitusi, melayani daripada mengontrol, nilai-nilai masyarakat, norma-norma politik, standar profesional, dan mengutamakan kepentingan publik negara tidak hanya mengawasi, dan menghargai setiap individu bukan hanya sekedar produktivitas.

5) *Good Governance*

Pergeseran paradigma dalam manajemen pemerintahan menuju konsep "*governance*" yang melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Paradigma ini menjadi respons terhadap pandangan sebelumnya yang memandang pemerintah sebagai satu-satunya entitas yang menjalankan pemerintahan. Pertemuan "Konsensus Washington" pada awal abad ke-20 menyoroti kehilangan bantuan asing

akibat praktik pemerintahan yang kurang memadai. Sebagai respons, prinsip-prinsip *good governance*, seperti keterbukaan, demokrasi, dan keseimbangan, diakui sebagai syarat bagi penerima bantuan (Ramadhan & Suryaningrum, 2020).

Analisis mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dapat dimasukkan ke dalam paradigma manajemen publik *New Public Management* (NPM) yang terdapat dalam paradigma kelima yakni administrasi publik sebagai administrasi publik. Paradigma ini menekankan pada hasil, kinerja, desentralisasi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta akuntabilitas dan transparansi. Dengan fokus pada peningkatan pemberian pelayanan pendidikan melalui penggunaan data dan analisis yang tepat, penelitian ini menawarkan solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di daerah tersebut.

Dalam penerapannya pada saat penelitian adalah pada identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan dan bagaimana mengatasinya secara efektif. Ini selaras dengan prinsip NPM yang berfokus pada hasil dan kinerja. Analisis kualitatif untuk memahami masalah dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Hal ini menunjukkan pendekatan yang sistematis dan berbasis kinerja dalam administrasi publik. Dengan menganalisis permasalahan pada tingkat kecamatan dan memberikan rekomendasi spesifik, penelitian ini mendukung desentralisasi dan pemberdayaan unit-unit lokal untuk meningkatkan partisipasi pendidikan. Selain itu, keterlibatan pemangku kepentingan, dimana rekomendasi untuk melibatkan berbagai pihak

seperti pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat mencerminkan pendekatan kolaboratif yang sering diadopsi dalam NPM.

1.5.4. Partisipasi Masyarakat

1.5.4.1. Definisi Partisipasi

Partisipasi, yang berasal dari bahasa Inggris "*participation*", merujuk pada kegiatan yang membangkitkan perasaan keterlibatan dan peran serta dalam suatu organisasi. Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam pembangunan, istilah ini mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penentuan strategi kebijakan pembangunan yang diimplementasikan oleh pemerintah, yang merupakan bagian penting dari peran serta masyarakat (Ngongare, dkk: 2019)

Hetifah (dalam Ngongare, dkk: 2019) berpendapat bahwa partisipasi adalah keterlibatan sukarela individu tanpa tekanan dan terlepas dari kepentingan eksternal pemerintah.

Histiraludin (dalam Ngongare dkk., 2019) menyatakan bahwa partisipasi lebih sering dipandang sebagai instrumen yang mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan suatu kegiatan. Partisipasi ini berperan sebagai sarana dalam memperkuat kohesi sosial, baik antaranggota masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah. Selain itu, partisipasi juga berkontribusi dalam membangun rasa memiliki serta tanggung jawab masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

Slamet (2003) (dalam Ngongare dkk., 2019), merujuk pada Valderama dalam Arsito, mengidentifikasi tiga konsep utama partisipasi dalam pembangunan masyarakat demokratis. Pertama, partisipasi politik (*political*

participation), yang menitikberatkan pada upaya mempengaruhi dan menempatkan perwakilan dalam institusi pemerintahan, dibandingkan dengan keterlibatan langsung dalam proses pemerintahan. Kedua, partisipasi sosial (*social participation*), yang melibatkan masyarakat sebagai penerima manfaat serta sebagai pihak yang turut serta dalam konsultasi dan pengambilan keputusan di setiap tahapan siklus proyek pembangunan, dari identifikasi kebutuhan hingga implementasi dan evaluasi. Partisipasi sosial bertujuan untuk memperkuat pembelajaran sosial dan mobilisasi masyarakat. Ketiga, partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), yang mengutamakan keterlibatan langsung individu dalam pengambilan keputusan di lembaga dan proses pemerintahan.

Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999:29) (dalam Normina, 2016) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan individu secara sadar dalam interaksi sosial dalam suatu kondisi tertentu. Dalam hal ini, individu turut serta dalam kelompok melalui berbagai mekanisme, seperti berbagi nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, serta tanggung jawab bersama.

Menurut Isbandi (2007:27) (dalam Normina, 2016), partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif individu dalam berbagai tahapan, yang mencakup identifikasi masalah dan potensi yang ada, pemilihan serta pengambilan keputusan terhadap alternatif solusi, pelaksanaan langkah-langkah penyelesaian permasalahan, hingga evaluasi atas perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999) (dalam Normina, 2016) mengklasifikasikan partisipasi ke dalam enam bentuk, yaitu:

- 1) Kontribusi sukarela masyarakat terhadap suatu proyek tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerima dan merespons proyek pembangunan.
- 3) Keterlibatan masyarakat secara sukarela dalam perubahan yang mereka tentukan sendiri.
- 4) Partisipasi aktif individu atau kelompok dalam mengambil inisiatif dan menggunakan hak kebebasannya.
- 5) Penguatan dialog antara masyarakat lokal dan tim proyek guna memperoleh informasi mengenai konteks lokal serta dampak sosial yang ditimbulkan.
- 6) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Conyers (1991) (dalam Normina, 2016) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat melalui tiga aspek utama. Pertama, partisipasi menjadi instrumen untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, serta sikap masyarakat setempat, yang krusial bagi keberhasilan program pembangunan. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan proyek berkontribusi dalam meningkatkan rasa memiliki serta kepercayaan terhadap proyek tersebut. Ketiga, partisipasi merupakan hak

demokratis masyarakat dalam menentukan arah pembangunan komunitas mereka sendiri.

Berdasarkan pendapat para ahli dari definisi partisipasi dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pembangunan, mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan strategi kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Partisipasi memiliki berbagai dimensi, termasuk partisipasi politik, sosial, dan warga, yang semuanya bertujuan memperkuat keterlibatan dan tanggung jawab masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi juga dianggap sebagai alat untuk menumbuhkan kohesi sosial dan memperkuat proses pembelajaran serta mobilisasi sosial. Beberapa ahli menekankan bahwa partisipasi harus bersifat sukarela dan tanpa tekanan, serta mencakup keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahap proyek pembangunan, dari identifikasi masalah hingga evaluasi perubahan yang terjadi.

Rendahnya partisipasi ini dapat diartikan sebagai kurangnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pendidikan, yang mencakup kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, minimnya kontribusi dalam bentuk dukungan terhadap institusi pendidikan, dan rendahnya tingkat inisiatif untuk memperbaiki sistem pendidikan setempat. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan sosial, rasa memiliki, serta memberikan dukungan untuk inisiatif menyesuaikan budaya setempat dan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

1.5.4.2. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff (1977) (dalam Ferry Setiawan dan Bhayu Rhama, 2021), partisipasi masyarakat dikategorikan ke dalam empat jenis:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Participation in Decision Making*), yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan keputusan organisasi. Bentuk partisipasi ini meliputi pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menilai suatu program sebelum ditetapkan, serta mengevaluasi kebijakan yang sedang berjalan. Keterlibatan ini juga berfungsi sebagai latihan bagi masyarakat dalam menentukan masa depan secara demokratis.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*Participation in Implementation*) merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam implementasi program pembangunan yang telah dirancang. Keterlibatan ini dapat berbentuk kontribusi tenaga, materi, atau dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta dapat bersifat sementara maupun berkelanjutan.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*Participation in Benefit*) mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan yang telah terealisasi.
- 4) Partisipasi dalam Evaluasi (*Participation in Evaluation*), yakni peran masyarakat dalam menilai dan mengawasi proses serta hasil pembangunan. Evaluasi dapat dilakukan secara langsung melalui

pengawasan dan penilaian, maupun secara tidak langsung melalui pemberian saran, kritik, atau protes.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan menurut Syafrizal Fuady (2022) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Partisipasi Finansial

Partisipasi dalam bentuk dukungan dana yang diberikan masyarakat sesuai dengan kapasitas dan kemampuan ekonomi mereka. Secara kolektif, orang tua dapat berkontribusi dalam penyediaan dana yang dibutuhkan oleh sekolah dengan akuntabilitas yang jelas guna menunjang keberhasilan pendidikan. Selain itu, sektor bisnis dan industri juga diharapkan dapat mengalokasikan anggaran tertentu untuk pemberian beasiswa bagi peserta didik.

2) Partisipasi Material

Kontribusi dalam bentuk pemberian sumber daya material yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, termasuk perbaikan serta penyempurnaan sarana dan prasarana pembelajaran. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga mencakup penciptaan kondisi fisik yang kondusif bagi proses pembelajaran.

3) Partisipasi Akademik

Dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas kegiatan akademik di sekolah. Bentuk partisipasi ini dapat berupa pengawasan serta pendampingan belajar anak di rumah oleh orang tua maupun masyarakat

sekitar. Selain itu, berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengikuti kegiatan praktik atau magang guna meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka.

4) Partisipasi Kultural

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta norma moral di lingkungan sekitar sekolah. Hal ini bertujuan agar sekolah dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam proses pendidikan.

5) Partisipasi Evaluatif

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik serta menilai efektivitas kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam perancangan kurikulum sekolah agar lebih sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik.

Menurut Huraerah (2008) (dalam Afifah, dkk: 2023), bentuk-bentuk partisipasi masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam Bentuk Kontribusi Pemikiran. Sumbangan yang berupa ide, gagasan, pendapat, saran, kritik membangun, serta pengalaman yang bertujuan untuk mendukung keberlangsungan suatu kegiatan.
- 2) Partisipasi dalam Bentuk Kontribusi Tenaga. Keterlibatan dalam berbagai aktivitas fisik, seperti perbaikan atau pembangunan fasilitas, pemberian

bantuan kepada individu yang membutuhkan, serta partisipasi dalam kegiatan yang dilakukan secara sukarela.

- 3) Partisipasi dalam Bentuk Kontribusi Harta. Dukungan dalam bentuk pemberian bantuan material, baik dalam bentuk uang, barang, maupun penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung keberlanjutan suatu program atau kegiatan.
- 4) Partisipasi dalam Bentuk Kontribusi Keterampilan. Penyediaan bantuan dalam bentuk keterampilan atau keahlian tertentu yang dimiliki individu untuk mendukung kelancaran serta efektivitas program yang dijalankan.
- 5) Partisipasi sosial. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk kepentingan bersama, baik dalam bentuk kerja sama maupun interaksi sosial yang mendukung kesejahteraan komunitas.

Bentuk partisipasi menurut Subroto dan Suryatna (1978) (dalam Afifah dkk, 2023) adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan dalam memberikan dukungan finansial.
- 2) Keterlibatan dalam memberikan kontribusi tenaga atau bantuan fisik.
- 3) Keterlibatan dalam memberikan dukungan material.
- 4) Keterlibatan dalam memberikan dukungan moral, yang mencakup pemberian saran, anjuran, nasihat, amanat, serta bentuk motivasi lainnya.

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah menurut Alwan Fawwaz dan Susanty (2024) dalam penelitiannya dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, masing-masing memiliki peran dan kontribusi

yang berbeda dalam mendukung perkembangan pendidikan. Beberapa bentuk partisipasi tersebut meliputi:

- 1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan. Masyarakat memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan sekolah, perencanaan program pembelajaran, serta distribusi sumber daya pendidikan.
- 2) Partisipasi dalam Perencanaan dan Evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi program pendidikan memungkinkan adanya pemantauan terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan di sekolah.
- 3) Partisipasi dalam Kegiatan Sekolah. Masyarakat dapat turut serta dalam berbagai kegiatan sekolah, seperti acara sosial, kegiatan ekstrakurikuler, maupun proyek pembelajaran.
- 4) Partisipasi dalam Pengawasan dan Pengawalan. Pengawasan terhadap kinerja sekolah oleh masyarakat berperan dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan.
- 5) Partisipasi dalam Pendanaan dan Penyediaan Sumber Daya. Masyarakat dapat berkontribusi dalam mendukung kegiatan pendidikan melalui penggalangan dana atau penyediaan sumber daya lainnya.
- 6) Partisipasi dalam Pendidikan Orang Tua. Program pelatihan bagi orang tua untuk meningkatkan keterampilan dalam mendukung pendidikan anak di rumah merupakan salah satu bentuk partisipasi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

- 7) Partisipasi dalam Advokasi dan Kampanye Pendidikan. Masyarakat dapat berperan dalam mengadvokasi berbagai isu pendidikan di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan merupakan faktor krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kontribusi material, akademik, kultural, serta evaluatif. Masyarakat berperan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan baik melalui dukungan langsung seperti pendanaan dan penyediaan sarana, maupun secara tidak langsung melalui pengawasan, evaluasi, serta advokasi kebijakan pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dikemukakan oleh Syafrizal Fuady (2022). Pemilihan teori bentuk partisipasi tersebut didasarkan pada relevansinya dalam konteks pendidikan formal. Teori ini mengelompokkan partisipasi masyarakat ke dalam lima bentuk utama, yaitu finansial, material, akademik, kultural, dan evaluatif, yang mencerminkan keterlibatan masyarakat secara komprehensif dalam mendukung pendidikan. Teori ini dipilih karena memberikan landasan konseptual yang jelas dalam memahami bagaimana masyarakat berkontribusi terhadap pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, teori ini juga memiliki relevansi empiris dalam menjelaskan keterlibatan masyarakat mencakup aspek fisik maupun non-fisik. Dengan demikian, bentuk partisipasi menurut

Syafrizal Fuady (2022) menjadi kerangka yang aplikatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat serta dampaknya terhadap aksesibilitas pendidikan di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

1.5.4.3. Faktor yang Berperan Dalam Partisipasi Masyarakat

Wastiti, dkk (2021) (dalam Afifah dkk, 2023) menguraikan pemahaman mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Faktor pendukung partisipasi masyarakat adalah aspek-aspek positif yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Sebaliknya, faktor penghambat partisipasi masyarakat, menurut Wastiti, dkk., adalah aspek-aspek negatif yang menimbulkan hambatan dalam partisipasi masyarakat.

Afifah dkk (2023), mengutip dari definisi oleh Chusnah (2008), menjelaskan faktor-faktor yang berperan dalam partisipasi masyarakat, di antaranya adalah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan mata pencaharian.

1) Jenis Kelamin

Partisipasi dari pria dan wanita berbeda karena adanya persepsi tentang perbedaan hak dan kewajiban yang terbentuk dari sistem pelapisan sosial dalam masyarakat yang membedakan kedudukan dan derajat antara pria dan wanita.

2) Usia

Usia dapat menjadi salah satu faktor partisipasi karena perbedaan kedudukan dan derajat berdasarkan senioritas dalam masyarakat, yang

menyebabkan perbedaan antara golongan tua dan golongan muda dalam menyampaikan pendapat dan membuat keputusan.

3) Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat menghambat partisipasi karena latar belakang pendidikan yang lebih baik membuat seseorang lebih mampu berkomunikasi dan lebih cepat dalam berinovasi.

4) Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan dapat menjadi penghambat dalam kemampuan finansial masyarakat untuk berinvestasi dalam partisipasi. Penghasilan yang lebih tinggi memberi peluang lebih besar untuk berperan serta.

5) Mata Pencaharian

Jenis pekerjaan menentukan tingkat penghasilan dan waktu luang yang dapat digunakan masyarakat untuk berpartisipasi. Pekerjaan dengan penghasilan lebih tinggi dan waktu luang lebih banyak akan memungkinkan masyarakat lebih aktif dalam berpartisipasi.

Faktor lain yang menyebabkan seorang anak tidak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi salah satunya ke jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah menurut Nana Syaodih Sukmadinata dan Ali Imron (dalam Siti Nurhasanah dan Yoskar Kadarisma, 2024) terdapat beberapa faktor penyebab anak putus sekolah. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

- a) Kurangnya minat belajar anak. Pendidikan merupakan tanggung jawab utama orang tua, namun anak juga harus memiliki keinginan sendiri untuk bersekolah. Tingkat minat dan motivasi anak untuk belajar sangat mempengaruhi apakah mereka akan terus bersekolah. Motivasi ini bisa datang dari keluarga, lingkungan, atau dari diri mereka sendiri.
- b) Sekolah dianggap tidak menarik. Anak juga bisa kehilangan minat bersekolah jika mereka merasa sekolah tidak menarik. Hal ini bisa terjadi karena mereka tidak tertarik pada pelajaran, kurang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler, atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekolah.
- c) Tidak menyukai sekolah. Beberapa anak tidak menyukai sekolah karena faktor-faktor tertentu, seperti lingkungan sekolah yang tidak nyaman, hubungan dengan teman sebaya yang buruk, atau ketidakcocokan dengan guru.

2) Faktor Eksternal

- a) Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi keputusan anak untuk bersekolah. Siswa yang tinggal di lingkungan di mana banyak anak putus sekolah cenderung lebih berisiko mengalami hal yang sama.
- b) Faktor sosial. Dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan orang tua, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pandangan mereka terhadap pendidikan. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah,

khususnya yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau tidak menyelesaikannya sama sekali, cenderung memiliki pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya pendidikan. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan anak untuk melanjutkan sekolah. Namun, ada juga kasus di mana orang tua yang berpendidikan tinggi masih mengalami anak putus sekolah, yang menunjukkan pentingnya peran minat anak itu sendiri.

Menurut Burhannudin (dalam Riswan Assa, dkk, 2022), terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor ekonomi, yang mencakup tingkat pendapatan orang tua, jenis pekerjaan yang ditekuni, jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta status kepemilikan tempat tinggal.
- 2) Kurangnya perhatian orang tua, dapat dilihat dari pandangan orang tua terhadap sekolah, semangat mereka dalam mendukung anak bersekolah, dan penyediaan fasilitas belajar yang memadai.
- 3) Fasilitas belajar yang kurang memadai, meliputi ketersediaan media dan buku ajar di lingkungan sekolah.
- 4) Rendahnya minat anak untuk bersekolah, yang terlihat dari motivasi belajar serta upaya yang dilakukan untuk tetap bersekolah.
- 5) Faktor budaya, yang mencakup kebiasaan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka serta pandangan kolektif terkait urgensi pendidikan.

- 6) Faktor lokasi sekolah, yang meliputi lokasi sekolah serta jarak yang harus ditempuh peserta didik dari tempat tinggal mereka.

Sedangkan menurut Ibrahim Arifin dkk (2024) faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan sekolahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor Ekonomi. Kondisi ekonomi yang tidak memadai menjadi penyebab utama anak-anak tidak melanjutkan pendidikan. Ketidakmampuan finansial ini mengakibatkan anak-anak lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
- 2) Faktor keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran penting dalam pendidikan anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan rendah sering kali tidak menganggap pendidikan sebagai prioritas utama, sehingga anak-anak mereka kurang mendapatkan dorongan untuk melanjutkan pendidikan.
- 3) Faktor Motivasi Diri. Rasa keinginan untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh motivasi dalam diri seseorang tanpa adanya motivasi dalam diri seseorang maka ia tidak akan mampu untuk bertindak guna mencapai tujuannya.
- 4) Pola Pikir Terhadap Sekolah. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar, tetapi banyak siswa merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton. Beberapa anak merasa tidak mampu memahami materi pelajaran, yang membuat mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan.

Selanjutnya menurut Ahmad Yaneri, Nike Vonika, dan Vivi Suviani

(2022) Faktor penyebab anak putus sekolah terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Faktor Internal

a) Intelegensi

Tingkat kecerdasan (inteligensi) peserta didik berpengaruh terhadap peluang keberhasilan mereka. Anak dengan inteligensi tinggi memiliki kesempatan lebih besar untuk meraih sukses, sedangkan anak dengan inteligensi rendah cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah dan akhirnya berpotensi untuk putus sekolah.

b) Motivasi

Keputusan untuk putus sekolah tidak selalu disebabkan oleh malasnya peserta didik.

c) Kesadaran Peserta Didik

Kesadaran peserta didik untuk melanjutkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan orang tua. Jika orang tua peduli terhadap pendidikan anak, mereka cenderung termotivasi untuk terus bersekolah. Kerjasama antara sekolah dan keluarga dalam memberikan perhatian kepada siswa dapat meningkatkan motivasi belajar dan menurunkan angka putus sekolah.

d) Faktor Ketidaksukaan Terhadap Sekolah

Fasilitas sekolah yang memadai penting untuk mendukung proses belajar mengajar. Namun, faktor sikap guru yang cenderung pilih kasih

dapat berdampak negatif pada psikologi siswa. Siswa harus dapat menerima tugas belajar sebagai tanggung jawab, dan peran orang tua sangat penting.

2) Faktor Eksternal

a) Faktor Ekonomi

Biaya pendidikan saat ini tidak menjadi alasan utama putus sekolah karena banyak sekolah yang menawarkan pendidikan gratis. Orang tua yang mampu diharapkan memberikan sumbangan sukarela tanpa paksaan. Selain itu, orang tua umumnya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

b) Faktor Sekolah

Metode pengajaran dan materi pelajaran yang diterapkan oleh guru perlu diperhatikan. Kurikulum yang terlalu padat dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa dapat menyebabkan tekanan dan mengurangi motivasi belajar. Relasi yang buruk antara siswa dan guru dapat menimbulkan pesimisme, sementara hubungan antar siswa dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka.

c) Faktor Sosial Budaya

Teman sebaya memiliki pengaruh terhadap keputusan pendidikan peserta didik. Jika mereka bergaul dengan teman yang putus sekolah, mereka berisiko mengikuti jejak yang sama. Oleh karena itu, penting untuk memiliki lingkungan sosial yang positif untuk mendukung pendidikan anak.

Berdasarkan beberapa kajian teori yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini akan menyoroti partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal tingkat SMA di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Penelitian ini mengacu pada teori faktor penyebab putus sekolah menurut Burhannudin (dalam Riswan Assa, dkk, 2022), yang mengidentifikasi enam faktor yang mempengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Faktor-faktor tersebut meliputi: faktor ekonomi yang mencakup keterbatasan finansial yang dialami keluarga, kurangnya perhatian orang tua yang dapat mengakibatkan kurangnya motivasi anak untuk bersekolah, fasilitas belajar yang kurang memadai, rendahnya minat anak untuk bersekolah yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, faktor budaya yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap pendidikan, dan faktor lokasi sekolah yang dapat menjadi hambatan aksesibilitas bagi anak.

Pemilihan faktor-faktor tersebut dalam penelitian ini didasari oleh relevansi dan dampaknya terhadap keputusan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, diharapkan dapat dirumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA).

1.6. Operasionalisasi Konsep

Penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo berdasarkan penyebab rendahnya partisipasi masyarakat. Teori partisipasi masyarakat yang

digunakan dalam penelitian ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, partisipasi mencakup keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sekolah, serta kesediaan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan artinya turut berperan serta atau terlibat dalam suatu hal di lingkungan sekolah. Fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di tingkat SMA Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo dengan melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam pendidikan yang dapat dilihat dalam berbagai bentuk, antara lain:

1) Partisipasi finansial

Masyarakat, khususnya orang tua, berperan dalam pembiayaan pendidikan sesuai dengan kapasitas ekonomi yang dimiliki. Kontribusi ini mencakup penyediaan dana yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pendidikan. Selain itu, sektor bisnis dan industri juga dapat berkontribusi melalui pemberian beasiswa atau pengalokasian anggaran khusus guna mendukung kegiatan pendidikan.

2) Partisipasi material

Kontribusi masyarakat dalam bentuk penyediaan bahan material untuk pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pembelajaran. Tujuan dari partisipasi ini adalah untuk memastikan kelancaran proses belajar mengajar. Selain itu, masyarakat turut berperan dalam menciptakan lingkungan fisik yang kondusif bagi kegiatan pendidikan.

3) Partisipasi akademik

Keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan akademik. Dukungan ini dapat berupa pengawasan serta bimbingan belajar anak di rumah oleh orang tua dan masyarakat. Selain itu, berbagai lembaga pemerintahan maupun non-pemerintahan dapat memberikan kesempatan magang atau praktik bagi peserta didik guna memperluas wawasan dan pengalaman mereka.

4) Partisipasi kultural

Peran masyarakat dalam menjaga serta mempertahankan nilai-nilai budaya dan moral di lingkungan sekolah. Hal ini memungkinkan institusi pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan budaya setempat, sehingga tercipta keselarasan antara sekolah dan komunitas di sekitarnya.

5) Partisipasi evaluatif

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat memberikan umpan balik serta melakukan penilaian terhadap efektivitas dan kinerja lembaga pendidikan.

Adapun faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan yang dalam penelitian ini mengacu pada teori faktor penyebab putus sekolah menurut Burhannudin (dalam Riswan Assa, dkk, 2022), yang dapat digunakan dan dikaitkan untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak melanjutkan pendidikan formal tingkat SMA di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi melibatkan aspek-aspek seperti penghasilan orang tua, jenis pekerjaan yang dijalani, jumlah anak atau anggota keluarga yang menjadi tanggungan, serta status tempat tinggal.

2) Kurangnya Perhatian Orang Tua

Kurangnya perhatian orang tua dapat diidentifikasi melalui sikap dan pandangan mereka terhadap pendidikan. Ini mencakup semangat orang tua dalam mendukung anak bersekolah serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai.

3) Fasilitas Belajar yang Kurang Memadai

Fasilitas belajar yang kurang memadai mencakup ketersediaan media, buku, dan sumber belajar lainnya di sekolah.

4) Rendahnya Minat Anak untuk Bersekolah

Rendahnya minat anak untuk bersekolah dapat dilihat dari semangat dan motivasi mereka untuk belajar, serta usaha yang dilakukan untuk tetap melanjutkan pendidikan.

5) Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi perilaku masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak dan pandangan mereka mengenai pentingnya pendidikan.

6) Faktor Lokasi Sekolah

Faktor lokasi sekolah mencakup letak dan jarak yang harus ditempuh anak-anak dari rumah ke sekolah.

Tabel 6. Operasionalisasi Konsep

Tujuan Penelitian	Fenomena	Definisi	Aspek yang Dilihat
Menganalisis bagaimana partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Partisipasi Finansial	Kontribusi atau dukungan orang tua dalam bentuk uang untuk penyelesaian pendidikan di SMA	Sumbangan uang tunai untuk pembangunan sekolah atau pembelian peralatan sekolah
			Dukungan sektor bisnis dalam pemberian beasiswa atau pengalokasian anggaran
	Partisipasi Material	Kontribusi orang tua masyarakat dalam bentuk barang atau jasa untuk mendukung sarana dan prasarana pendidikan. Masyarakat juga mendukung lingkungan fisik yang kondusif	Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan barang atau sumber daya fisik
			Sumbangan bahan bangunan untuk renovasi atau pembangunan sekolah
			Kondisi lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar.
	Partisipasi Akademik	Keterlibatan dalam bentuk dukungan orang tua dan masyarakat untuk mengawasi dan membimbing anak-anak mereka dalam proses pendidikan.	Penyediaan bimbingan belajar dan keterlibatan dalam kegiatan akademik sekolah
			Kontribusi dalam pengembangan program pengajaran
	Partisipasi Kultural	Perhatian masyarakat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan moral dalam lingkungan sekolah	Pelibatan masyarakat dalam memberikan pemahaman terhadap sekolah yang menyesuaikan dengan budaya masyarakat setempat
			Menyesuaikan diri

			dengan kultur religius desa di sekitar sekolah
	Partisipasi Evaluatif	Keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan	Pengawasan terhadap proses pembelajaran
			Pemberian saran dan kritik terhadap program sekolah ataupun layanan pendidikan yang diberikan
			Partisipasi dalam pertemuan yang membahas perkembangan akademik siswa.
Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan formal ke tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo	Faktor Ekonomi	Kondisi finansial keluarga yang tidak memadai sehingga membatasi kemampuan untuk membiayai pendidikan anak hingga ke tingkat SMA	Keterjangkauan biaya pendidikan anak
			Akses terhadap bantuan keuangan untuk pendidikan
	Kurangnya Perhatian Orang Tua	Minimnya dukungan moral, motivasi, atau perhatian dari orang tua terhadap pendidikan anak, sehingga mengurangi dorongan anak untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA	Keterlibatan orang tua dalam pengambilan keputusan pendidikan
			Bentuk dukungan atau dorongan orang tua kepada anak dalam pendidikan.
	Fasilitas Belajar yang Kurang Memadai	Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang tidak mencukupi, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang menghambat proses belajar-mengajar di sekolah	Akses terhadap teknologi pendidikan seperti komputer atau internet
			Kondisi fisik fasilitas belajar di sekolah yaitu terkait sarana dan prasarana
	Rendahnya Minat	Ketidaktertarikan atau keengganan anak untuk	Persepsi anak tentang manfaat pendidikan

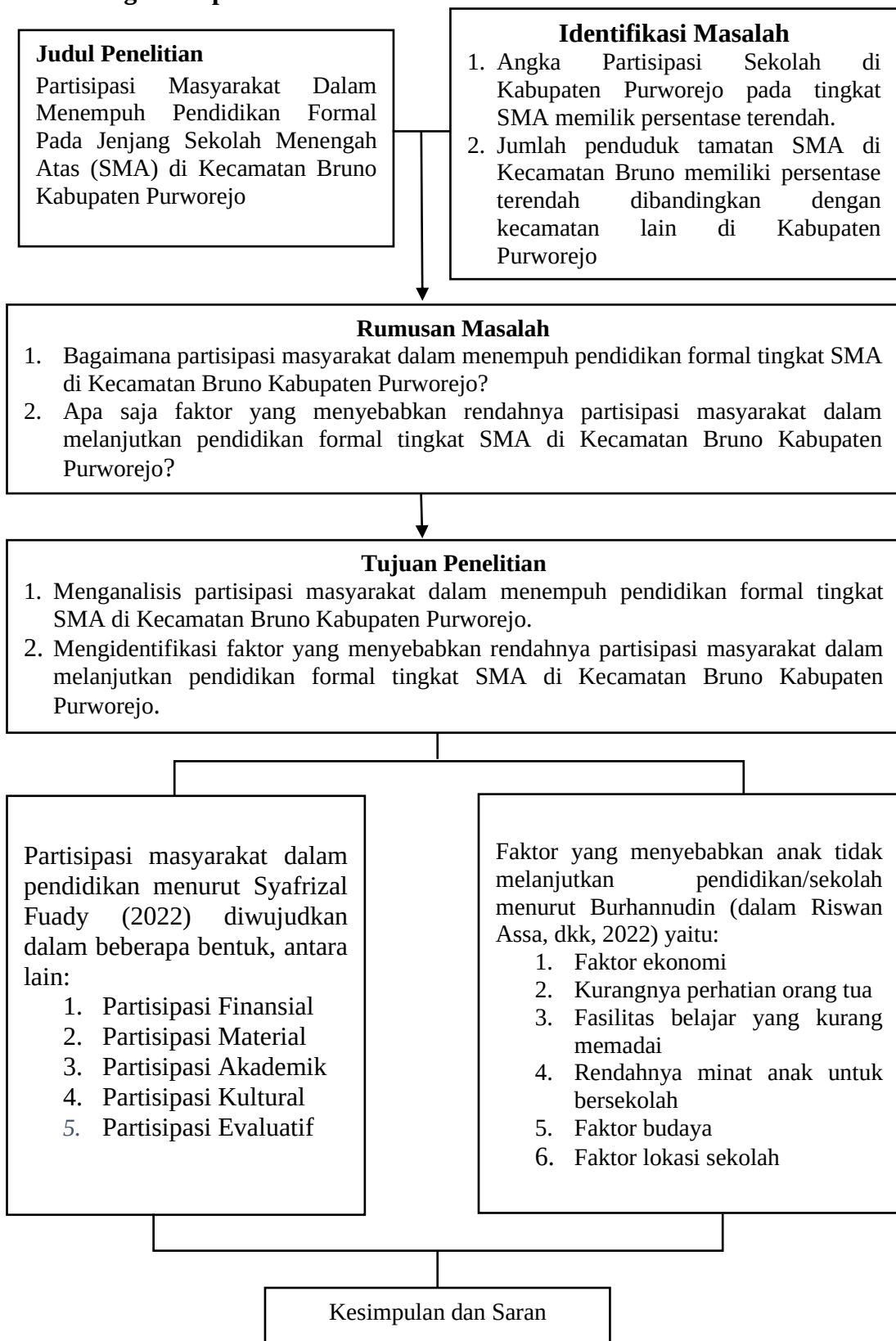
	Anak Untuk Bersekolah	melanjutkan pendidikan ke SMA karena kurangnya motivasi, kurangnya kesadaran akan manfaat pendidikan, atau minat yang lebih besar untuk bekerja	Dampak lingkungan sosial terhadap minat anak dalam pendidikan
			Motivasi anak untuk bekerja setelah lulus dari SMP
	Faktor Budaya	Norma, nilai, dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat yang dapat memengaruhi keputusan keluarga dan anak untuk melanjutkan pendidikan ke SMA	Pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan formal
			Dampak tradisi terhadap partisipasi pendidikan
	Faktor Lokasi Sekolah	Jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal dan kesulitan akses transportasi yang membuat anak sulit menjangkau sekolah, sehingga menurunkan minat untuk melanjutkan pendidikan.	Jarak rumah ke sekolah serta ketersediaan dan biaya transportasi
			Kemudahan akses ke sekolah (jalan, kendaraan umum, dll.)

1.7. Argumen Penelitian

Penelitian ini mengidentifikasi adanya masalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Ini merupakan langkah awal yang penting untuk memahami akar permasalahan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikannya. Penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Bruno di Kabupaten Purworejo. Dengan membatasi ruang lingkup pada area tertentu, penelitian dapat lebih fokus dan mendalam dalam menganalisis situasi pendidikan di wilayah tersebut. Fokus penelitian adalah pada partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal. Hal mencakup berbagai aspek partisipasi, seperti tingkat

keberlanjutan siswa dalam bersekolah, dukungan orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka, dan bentuk masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan. Penelitian ini membatasi lingkupnya pada pendidikan formal terutama pada jenjang menengah atas. Dengan demikian, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas di Kecamatan Bruno. Kecamatan Bruno sebagai lokasi penelitian dipilih karena relevansinya dengan fenomena yang sedang diteliti. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang berperan dalam partisipasi pendidikan di wilayah tersebut, sehingga solusi yang tepat dapat diusulkan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan di Kecamatan Bruno dan mungkin juga dapat diterapkan pada konteks serupa di tempat lain dengan fenomena serupa.

1.8. Kerangka Berpikir



1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang dikaji, yakni rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Kecamatan Bruno. Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan penjelasan dan menganalisis mengenai fenomena tersebut. Dalam pendekatan kualitatif, penekanan utama diberikan pada deskripsi serta interpretasi data yang diperoleh, bukan pada aspek pengukuran atau pengujian hipotesis. Pengumpulan data dilakukan secara mendalam dan terperinci guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dalam melanjutkan pendidikan di wilayah tersebut. Pendekatan kualitatif umumnya bersifat induktif, di mana teori atau kerangka konseptual dikonstruksi berdasarkan temuan empiris yang diperoleh dari data. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru atau teori yang muncul sebagai hasil analisis data yang dilakukan.

1.9.2. Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan peneliti karena adanya fenomena rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal pada tingkat SMA.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian akan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam konteks rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Kecamatan Bruno. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan metode pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi dan permasalahan yang diteliti di lapangan. Informan dalam penelitian ini antara lain:

1) Anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA

Subjek ini dipilih karena mengetahui alasan, hambatan, dan motivasi mereka dalam tidak melanjutkan pendidikan.

2) Orang tua dari anak yang tidak melanjutkan pendidikan ke SMA

Orang tua merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan pendidikan anak. Dipilih guna memahami peran keluarga dalam pengambilan keputusan pendidikan, terutama terkait faktor ekonomi, sosial, dan nilai yang dianut.

3) Perangkat Desa di Kecamatan Bruno

Perangkat desa dipilih karena memiliki data dan pemahaman terhadap kondisi sosial atau faktor lingkungan yang turut memengaruhi partisipasi pendidikan oleh masyarakat setempat.

4) Kepala Sekolah SMAS Islam Sudirman Bruno

Dipilih untuk memberikan perspektif mengenai bentuk partisipasi orang tua dan siswa di sekolah, tantangan yang dihadapi sekolah dalam menjangkau calon peserta didik.

5) Orang tua dari anak yang melanjutkan ke SMA

Subjek ini memberikan perspektif perbandingan terkait bentuk partisipasi di sekolah, motivasi, dan dukungan yang diberikan oleh orang tua dalam pendidikan anak hingga jenjang SMA.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif yaitu dengan fokus pada data dalam bentuk teks, tulisan, kata-kata, atau frasa yang mencerminkan atau merepresentasikan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif dan eksplanatif. Ini termasuk data kualitatif berupa pandangan, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal di Kecamatan Bruno. Data ini akan membantu dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi serta memberikan wawasan yang mendalam tentang masalah tersebut. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat deskriptif dan berupa teks, gambar, suara, atau video. Peneliti akan menggunakan teknik seperti wawancara, dan analisis dokumen untuk mengumpulkan data kualitatif yang relevan.

1.9.5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui instrumen atau teknik pengumpulan data yang diterapkan langsung kepada subjek sebagai sumber utama informasi. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkepentingan atau yang akan menggunakan data tersebut dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala sekolah di SMA Kecamatan Bruno dan Masyarakat atau tokoh masyarakat yang memiliki wawasan terkait bentuk partisipasi pendidikan di kecamatan Bruno. Kemudian individu yang pada tahun terkait tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA dengan tujuan memperoleh informasi langsung mengenai fokus penelitian mengenai faktor yang berperan dalam tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di tingkat SMA Kecamatan Bruno kabupaten Purworejo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data ini biasanya berbentuk dokumentasi atau laporan yang telah tersedia. Dalam penelitian ini, data sekunder diambil dari berbagai jenis sumber, seperti literatur dari buku dan jurnal, informasi yang tersedia di internet, liputan media massa, dan laporan berita pada

surat kabar yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Semua data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal tingkat SMA di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

Tujuan pengumpulan data ini adalah untuk menyajikan deskripsi yang komprehensif terkait fenomena tersebut. Data yang berhasil dikumpulkan akan diarahkan pada analisis yang mendalam dengan merujuk pada kerangka konseptual yang telah ditetapkan sebelumnya. Kerangka konseptual tersebut akan menjadi landasan untuk menginterpretasikan hasil data, memungkinkan penyusunan kesimpulan yang tepat dan relevan berdasarkan informasi yang telah berhasil dikumpulkan. Pemilihan sumber data ini dilakukan dengan mempertimbangkan keberagaman informasi yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan cermat dan akurat.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Setiap teknik pengumpulan data dipilih berdasarkan kebutuhan spesifik penelitian. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam dari perspektif individu, dokumentasi menyediakan informasi historis, dan studi pustaka memperkaya penelitian dengan konsep teoritis yang mapan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian rendahnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan dengan pertanyaan yang terstruktur dan mendalam. Tahapannya melibatkan perumusan pertanyaan yang relevan, identifikasi informan yang tepat, dan pelaksanaan wawancara dengan cermat.

Tahap pertama dalam pelaksanaan wawancara ini melibatkan perumusan pertanyaan yang terstruktur dan relevan. Peneliti akan menyusun kumpulan pertanyaan yang dirancang secara cermat untuk menggali informasi mendalam tentang permasalahan yang mungkin timbul sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal. Pertanyaan akan diformulasikan sedemikian rupa untuk mencakup faktor penyebab, prosedur kompleks, dan hambatan lain yang mungkin ditemui dalam menempuh pendidikan formal.

Tahap kedua akan melibatkan identifikasi informan yang tepat. Peneliti akan melakukan seleksi dengan cermat untuk menentukan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pemilihan informan ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan representatif.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan wawancara dengan cermat. Peneliti akan menghubungi dan menjadwalkan wawancara dengan informan yang telah terpilih. Selama wawancara, pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan akan diajukan dengan seksama untuk menggali

pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diidentifikasi sebelumnya. Interaksi langsung ini akan memberikan kesempatan bagi peneliti untuk memperoleh perspektif yang kaya dan konteks informasi yang sulit diperoleh melalui metode lain.

Sebelum tahap pelaksanaan, peneliti akan memastikan bahwa informan yang relevan untuk wawancara mendalam telah diidentifikasi secara tepat. Jumlah narasumber akan dipertimbangkan untuk memastikan representativitas sampai tingkat kejenuhan data tercapai. Poin-poin kunci dalam pertanyaan akan dijelaskan secara rinci untuk memastikan kejelasan tujuan dan fokus wawancara, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara efektif dalam analisis mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi

Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen resmi, catatan, atau arsip yang relevan dengan penelitian. Proses dokumentasi akan melibatkan penggunaan instrumen atau alat tertentu untuk mengumpulkan data. Instrumen tersebut dapat mencakup formulir, checklist, kamera, perekam suara, dan panduan wawancara. Tahapannya mencakup identifikasi sumber dokumen, pengumpulan data, dan evaluasi keandalan serta kevalidan informasi. Alat yang digunakan dapat berupa formulir pengumpulan data dan checklist evaluasi dokumen. Penggunaan teknik dokumentasi membantu memperoleh data historis atau kontekstual yang penting dalam penelitian.

3. Studi Pustaka

Proses ini melibatkan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tahapannya mencakup pencarian dan seleksi literatur, ekstraksi informasi relevan, dan sintesis temuan literatur. Alat yang digunakan dapat berupa basis data literatur dan perangkat lunak manajemen referensi. Studi pustaka memberikan dasar teoritis dan konteks konseptual untuk penelitian, meningkatkan keakuratan interpretasi data. Studi pustaka akan diuraikan sebagai proses analisis literatur dan referensi yang relevan dengan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Penjelasan akan mencakup sumber-sumber yang diakses, metodologi pencarian, dan kriteria seleksi. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam studi pustaka juga akan diidentifikasi untuk memahami kontribusi dan bentuk partisipasi masyarakat. Data yang digunakan berasal dari sumber-sumber yang dapat diandalkan, seperti buku, jurnal, tesis, situs web organisasi, berita media massa, hasil survei sebelumnya, dan sumber lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi yang berkaitan dengan subjek penelitian, dan kemudian dipilih secara hati-hati untuk memilih data yang dianggap penting dan dapat diandalkan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian ini, seluruh informasi yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam dan melalui proses pengolahan data untuk dikonversi menjadi narasi yang mendukung kajian ini. Mengingat penelitian ini bersifat kualitatif,

sebagian besar data yang dikumpulkan merupakan data non-numerik dan tidak melibatkan analisis statistik. Secara umum, analisis data dalam penelitian ini mengacu pada tahapan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992), yang terdiri dari beberapa langkah, di antaranya:

- 1) Reduksi data, yaitu proses penyaringan, penyederhanaan, abstraksi, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tahapan ini mencakup pemilihan data yang relevan dan signifikan bagi penelitian, sekaligus mengurangi volume data guna memastikan bahwa hanya informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang digunakan. Dengan demikian, proses ini bertujuan untuk menghindari potensi bias dalam analisis.
- 2) Penyajian data, yaitu proses menyajikan data dalam berbagai bentuk seperti narasi ringkas, diagram, tabel, grafik, serta mengeksplorasi hubungan antar kategori data lainnya. Tujuan dari penyajian data adalah agar peneliti dapat memahami situasi yang ada dan merencanakan Langkah-langkah berikutnya.
- 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu langkah-langkah untuk memastikan keandalan dan keaslian data, dengan melakukan koreksi jika diperlukan. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan akhir yang dihasilkan akan menjadi kesimpulan yang kuat dan akurat berdasarkan data yang valid.

1.9.8. Kualitas Data

Penelitian ini menerapkan metode triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas data yang diperoleh. Triangulasi sumber dilakukan dengan melibatkan lebih dari satu informan dalam proses pengumpulan data, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data guna memperoleh informasi yang sejenis. Data utama dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan individu yang tidak melanjutkan pendidikan hingga jenjang SMA di Kecamatan Bruno. Selain itu, informan penelitian juga mencakup kepala sekolah tingkat SMA di wilayah tersebut serta masyarakat yang memiliki wawasan mengenai isu pendidikan di Kecamatan Bruno. Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan teknik pengumpulan data lainnya, seperti studi pustaka, untuk menggali lebih dalam mengenai partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan formal di tingkat SMA di Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo.